

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PRAKTIK GADAI  
PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM SAMDEDE PERKASA DI YOGYAKARTA  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Oleh :

Francisca Westri Indasari

12/328548/HK/19024 – Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

2016

Manusia dalam mempertahankan hidupnya haruslah dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, di mana pemenuhan kebutuhan tersebut sangatlah bergantung pada kondisi perekonomian masing-masing individu. Indonesia merupakan negara yang masih memiliki banyak masyarakat miskin dan kurang mampu yang membutuhkan biaya bagi pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari sehingga sering kali masyarakat mencari jalan pintas untuk mendapatkan dana dengan cara menggadaikan benda berharga miliknya.

Koperasi Simpan Pinjam Samdede Perkasa sebagai salah satu lembaga perkoperasian yang menyediakan jasa penjaminan BPKB atau lebih dikenal dengan sebutan “Gadai BPKB” bagi masyarakat yang membutuhkan dana melaksanakan kegiatan gadai yang menyimpang dari ketentuan Pasal 1150 dan 1152 KUHPPerdata. Kegiatan gadai tersebut justru mengarah pada praktik fidusia, namun pelaksanaannya pun tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sehingga penulis menyimpulkan bahwa telah terjadi praktik penyelundupan fidusia, oleh karena itu masyarakat membutuhkan perlindungan hukum baik untuk mencegah maupun menyelesaikan sengketa yang telah terjadi yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini bersifat yuridis empiris dan bertujuan untuk mengumpulkan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan juga data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan. Cara memperoleh data dilakukan penulis dengan menelusuri dokumen-dokumen atau himpunan peraturan perundang-undangan serta penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis dan juga melakukan wawancara secara langsung terhadap subjek penelitian.

## **ABSTRACT**

People in defending his life must be able to meet the needs of everyday life, where the fulfillment of those needs is highly dependent on the conditions of each individual economy. Indonesia is a country that still has many of the poor and the underprivileged who are in need of cost for the fulfillment of the needs of everyday life, so often the community looking for a shortcut to get the funds by way of his valuables to pawn.

Samdede Perkasa Loan Cooperative as one of the agencies that provide services guaranteeing BPKB for the people that need the funds carry out pledge that deviate from the provisions of article 1150 and 1152 of the Civil Law. The pledge activities thus led to the fiduciary practices, but its implementation is not in accordance with the Act No. 42 of 1999 regarding Fiduciary Guarantee so the author conclude that there has been smuggling fiduciary practices, therefore it needs legal protection either to prevent or resolve disputes that have occurred based on Act No. 8 of 1999 on the protection of consumers.

This research is empirical and juridical aims to collect secondary data obtained through librarianship research and also primary data obtained through field research. How to obtain data done by tracing documents or sets of regulations as well as search through internet-related research and also conduct interviews directly against the subject of the research.